

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi di berbagai negara. Menurut *World Travel and Tourism Council (WTTC, 2024)*, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB global mencapai 9,1%, dengan proyeksi pertumbuhan rata-rata 5,8% per tahun hingga 2030. Tren ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Di Indonesia, pariwisata menjadi sektor strategis nasional yang masuk dalam *RPJMN 2020–2025* sebagai penggerak utama ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan. Data *BPS (2024)* mencatat, kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional mencapai 4,32%, meningkat dari 3,5% pada tahun 2022 setelah pemulihan pasca-pandemi. Peningkatan ini didorong oleh kebijakan pemerintah untuk memperkuat destinasi unggulan, termasuk kawasan wisata prioritas seperti Labuan Bajo dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketimpangan pengelolaan destinasi wisata antara wilayah barat dan timur Indonesia masih mencolok. Wilayah timur, khususnya NTT, memiliki potensi besar dalam wisata bahari dan ekowisata, namun belum diikuti dengan kebijakan pembangunan daerah yang optimal (Tussadiah et al. 2021). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan wisata di daerah bukan hanya soal potensi alam, tetapi juga efektivitas politik pembangunan dan tata kelola daerah.

Secara global, pendekatan pembangunan pariwisata telah bergeser menuju konsep *community-based tourism (CBT)* dan *sustainable tourism*. Model ini menekankan partisipasi masyarakat lokal dalam setiap tahap pengembangan wisata, dari perencanaan hingga pengelolaan (Laurentius, Fios, and Situmorang 2021). Pendekatan ini relevan diterapkan di daerah seperti NTT, di mana struktur sosial berbasis komunitas masih sangat kuat.

Dalam konteks politik pembangunan daerah, kebijakan pariwisata tidak hanya berbicara tentang promosi dan infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah daerah membangun relasi dan kapasitas kelembagaan untuk mengelola potensi yang ada secara berkelanjutan (Idrus 2020). Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan pariwisata sangat dipengaruhi oleh dinamika politik lokal.

Kabupaten Sikka, yang terletak di pesisir utara Pulau Flores, memiliki banyak potensi wisata pantai, salah satunya Pantai Tanjung Kajuwulu di Desa Magepanda. Pantai ini dikenal memiliki panorama alam yang indah dan potensi sebagai destinasi wisata bahari unggulan. Namun, pengelolaannya masih menghadapi tantangan dari sisi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan promosi daerah.

Berdasarkan data *Dinas Pariwisata Kabupaten Sikka (2023)*, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Pantai Tanjung Kajuwulu hanya sekitar 3.200 orang per tahun, jauh di bawah potensi maksimalnya yang diperkirakan bisa mencapai lebih dari 10.000 kunjungan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi wisata dan realisasi pemanfaatannya.

Salah satu faktor penyebab adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku wisata, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan wisata (Fanggidae and SE 2020). Struktur birokrasi yang tidak efisien serta kurangnya dukungan kebijakan konkret menyebabkan pengembangan wisata tidak terarah dan berkelanjutan.

Selain itu, kurangnya investasi pada infrastruktur dasar seperti akses jalan, fasilitas sanitasi, dan jaringan komunikasi juga menjadi kendala besar dalam menarik minat wisatawan. Padahal, potensi wisata bahari dan budaya di sekitar Desa Magepanda sangat tinggi dan memiliki daya tarik unik dibandingkan wilayah lain di Flores Timur (Gita, Widiyanto, and Rahmadanik 2024).

Permasalahan lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan wisata. Banyak kebijakan pariwisata bersifat top-down, tanpa mempertimbangkan aspirasi

masyarakat setempat yang menjadi pelaku utama di lapangan (Laurentius, Fios, and Situmorang 2021).

Penelitian oleh (Tussadiah et al. 2021) menekankan pentingnya kebijakan pengelolaan ekosistem pesisir di Nusa Tenggara Timur untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Mereka menemukan bahwa kelemahan utama terletak pada minimnya integrasi antara kebijakan lingkungan dan kebijakan pariwisata.

(Laurentius, Fios, and Situmorang 2021) menganalisis modal manusia dalam pengembangan ekowisata di Labuan Bajo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal menjadi faktor kunci dalam keberhasilan destinasi berbasis komunitas.

(Gita, Widiyanto, and Rahmadanik 2024) melalui studi di Desa Bedalewun, Flores Timur, menemukan bahwa strategi promosi dan partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap peningkatan kunjungan wisatawan. Namun, kebijakan daerah masih belum secara optimal mendukung pengelolaan wisata berbasis masyarakat.

Sementara itu, (Idrus 2020) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pariwisata daerah sering kali terbentur pada lemahnya evaluasi program dan ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan daerah. Kasus di Pantai Nambo, Kendari, memperlihatkan bahwa kebijakan yang tidak kontekstual dapat menghambat perkembangan wisata lokal.

Penelitian lain oleh (Ringa 2022) menyoroti pentingnya strategi berbasis komunitas di Kota Kupang. Ia mengusulkan *Place Triangle Strategy* untuk menghubungkan aspek masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Meski berbagai studi telah dilakukan di wilayah NTT, sebagian besar penelitian masih berfokus pada Labuan Bajo atau Kota Kupang, sementara kawasan pesisir lain seperti Pantai Tanjung Kajuwulu di Kabupaten Sikka jarang mendapat perhatian akademik yang mendalam.

Berdasarkan hasil telaah, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian pada dimensi *politik pembangunan daerah* dalam konteks pengelolaan potensi wisata berbasis masyarakat di daerah non-

prioritas seperti Sikka. Sebagian besar studi terdahulu lebih menekankan aspek ekowisata atau ekonomi kreatif, bukan dinamika kebijakan dan governance.

Belum banyak penelitian yang menganalisis secara mendalam bagaimana proses politik lokal dan peran pemerintah daerah berpengaruh terhadap keberlanjutan destinasi wisata di tingkat desa. Padahal, konteks politik lokal memainkan peran penting dalam penentuan prioritas Pembangunan (Idrus 2020).

Selain itu, belum ada kajian yang secara spesifik meneliti sinergi antara kebijakan pembangunan daerah dan pengelolaan partisipatif masyarakat di kawasan Pantai Tanjung Kajuwulu. Ini menjadi celah penting bagi penelitian baru untuk mengisi kekosongan tersebut (Gita, Widiyanto, and Rahmadanik 2024).

Pendekatan penelitian sebelumnya juga cenderung kuantitatif atau berbasis survei makro. Padahal, untuk memahami fenomena sosial-politik di tingkat lokal, diperlukan pendekatan kualitatif yang dapat menggali makna dan dinamika interaksi antara aktor kebijakan, pelaku wisata, dan masyarakat setempat (Laurentius, Fios, and Situmorang 2021).

Dalam hal kebijakan pembangunan daerah, belum banyak studi yang menjelaskan bagaimana keputusan politik, alokasi anggaran, dan dukungan kebijakan berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan destinasi wisata di tingkat desa (Tussadiah et al. 2021).

Penelitian ini menjadi penting karena pengembangan wisata daerah seperti Pantai Tanjung Kajuwulu tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga sosial-politik dan lingkungan. Kajian yang komprehensif akan membantu memahami bagaimana dinamika kebijakan lokal berkontribusi terhadap efektivitas pembangunan pariwisata daerah.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berupaya menggali persepsi, pengalaman, dan strategi aktor lokal dalam mengelola potensi wisata berbasis masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang praktik politik pembangunan daerah di tingkat lokal.

Hasil penelitian ini juga akan memperkaya literatur tentang tata kelola pembangunan pariwisata di wilayah Indonesia bagian timur yang selama ini relatif terpinggirkan dalam penelitian akademik. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengelolaan wisata yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas masyarakat lokal agar mampu menjadi subjek utama dalam pengelolaan potensi wisata di desanya sendiri. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih inklusif di Kabupaten Sikka, khususnya dalam memadukan aspek politik pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Secara teoretis, hasil studi diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai hubungan antara politik pembangunan daerah dan tata kelola pariwisata berbasis komunitas, sebuah bidang kajian yang masih terbatas di Indonesia bagian timur (Ringa 2022). Penelitian ini juga diharapkan membuka ruang dialog antara akademisi, pembuat kebijakan, dan pelaku wisata untuk membangun model pengelolaan wisata yang adaptif terhadap konteks sosial-politik lokal.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada upayanya untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan pembangunan daerah dan realitas sosial masyarakat pesisir dalam konteks pengelolaan potensi wisata Pantai Tanjung Kajuwulu, sehingga menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat politik pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 km, menjadikannya salah satu negara dengan potensi wisata bahari terbesar di dunia. Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya dioptimalkan dalam pembangunan daerah, terutama di kawasan timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berdasarkan data *Badan Pusat Statistik (BPS, 2024)*, kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 4,32%, dengan target peningkatan menjadi 6% pada tahun 2025. Namun, sebagian besar kontribusi tersebut masih didominasi oleh daerah di Pulau Jawa dan Bali. NTT hanya menyumbang kurang dari 0,5% dari total kontribusi nasional, meskipun memiliki potensi wisata bahari dan budaya yang sangat tinggi.

Kabupaten Sikka merupakan salah satu daerah di NTT yang memiliki potensi wisata alam dan bahari besar. Salah satu destinasi unggulannya adalah Pantai Tanjung Kajuwulu di Desa Magepanda, yang dikenal dengan panorama laut biru, bukit-bukit karst, dan aktivitas wisata bahari seperti snorkeling serta pendakian. Namun, pengelolaan potensi wisata ini masih minim dan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal.

Berdasarkan laporan *Dinas Pariwisata Kabupaten Sikka (2023)*, kunjungan wisatawan ke kawasan Pantai Tanjung Kajuwulu hanya sekitar 3.200 orang per tahun, jauh di bawah potensi maksimalnya. Dari jumlah tersebut, 80% wisatawan adalah lokal, sedangkan kontribusi wisatawan mancanegara kurang dari 5%. Data ini menunjukkan bahwa kawasan ini masih berstatus sebagai potensi tidur (*sleeping potential*) dalam pengembangan ekonomi daerah.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara potensi wisata dan hasil pembangunan daerah. Potensi alam dan budaya yang melimpah belum mampu dimanfaatkan secara optimal karena lemahnya kebijakan pembangunan daerah dan tata kelola pariwisata.

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana politik pembangunan daerah memengaruhi efektivitas pengelolaan potensi wisata di kawasan Pantai Tanjung Kajuwulu. Dinamika politik lokal, struktur birokrasi, dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penentu yang belum terkelola dengan baik.

Dampak dari lemahnya kebijakan pembangunan daerah ini cukup signifikan. Secara ekonomi, masyarakat lokal belum memperoleh manfaat

optimal dari kegiatan pariwisata. Secara sosial, terjadi kecenderungan marginalisasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan secara lingkungan, kurangnya kebijakan pengelolaan berkelanjutan mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir.

Jika masalah ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan terjadi penurunan daya tarik wisata, eksploitasi sumber daya alam tanpa perencanaan, dan melemahnya posisi masyarakat lokal dalam arus pembangunan pariwisata berbasis kapital. Dalam jangka panjang, ini dapat menghambat upaya pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan di NTT.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan utama penelitian ini adalah adanya ketidakefektifan politik pembangunan daerah dalam mengelola potensi wisata secara berkelanjutan dan partisipatif di kawasan Pantai Tanjung Kajuwulu.

Fenomena ini mencerminkan bahwa kebijakan pembangunan daerah belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan, tetapi masih didominasi oleh pendekatan top-down yang berorientasi proyek.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan pembangunan daerah diformulasikan, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam konteks pengelolaan wisata berbasis masyarakat di tingkat desa.

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan ilmiah dengan menggali makna, persepsi, dan praktik politik pembangunan daerah dari perspektif aktor-aktor lokal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi empiris yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan wisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir.

Secara konseptual, penelitian ini akan memperkaya kajian governance and local development dalam konteks pariwisata di Indonesia bagian timur,

serta memperluas pemahaman akademik mengenai keterkaitan antara politik pembangunan daerah dan tata kelola wisata berbasis komunitas.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana Kebijakan dan Implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dalam pengelolaan potensi wisata di Pantai Tanjung Kajuwulu?
2. Bagaimana peran dan strategi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan pariwisata di Pantai Tanjung Kajuwulu?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan akademik**

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian politik pembangunan daerah, khususnya dalam konteks tata kelola sektor pariwisata yang menjadi instrumen strategis pembangunan ekonomi lokal.
2. Memperluas pemahaman teoretis mengenai hubungan antara kekuasaan politik, kebijakan publik, dan pembangunan daerah, melalui pendekatan empiris terhadap kasus Kabupaten Sikka.
3. Memperkuat relevansi disiplin Ilmu Politik dalam isu-isu pembangunan kontemporer, terutama terkait desentralisasi, demokratisasi lokal, dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan berbasis potensi daerah.

#### **1.4.2 Tujuan Praktis**

1. Memberikan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Sikka agar dapat memperkuat arah politik pembangunan daerah yang berorientasi pada sektor pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
2. Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Pariwisata Kabupaten Sikka dalam menjalankan fungsi koordinasi, perencanaan, dan implementasi kebijakan pembangunan pariwisata.
3. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Tanjung Kajuwulu.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Akademik**

1. Memperkuat pemahaman tentang politik pembangunan daerah, yaitu bagaimana kekuasaan, kepemimpinan, dan kebijakan publik saling berinteraksi dalam proses pembangunan sektor pariwisata di tingkat lokal.
2. Memperluas kajian kebijakan publik dalam perspektif politik, dengan menegaskan bahwa kebijakan pariwisata merupakan produk dari proses politik, bukan semata keputusan administratif.
3. Memperkaya wacana good governance dan partisipasi masyarakat, menunjukkan pentingnya transparansi, koordinasi antarinstansi, dan keterlibatan masyarakat dalam politik pembangunan daerah.

### **1.5.2 Manfaat praktis**

1. Dapat berguna sebagai masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sikka dalam mengevaluasi dan meningkatkan pengembangan objek wisata Pantai Tanjung Kajuwulu Kabupaten Sikka.
2. Memberikan gambaran empirik mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan potensi wisata Pantai Tanjung Kajuwulu.
3. Akademisi dan peneliti Ilmu Politik, sebagai bahan referensi dan studi empiris tentang hubungan antara politik pembangunan, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan daerah.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan membaginya ke dalam 5 bab yang saling berkaitan dan diuraikan secara sistematis, sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian pembuka yang akan menguraikan pembahasan skripsi yang mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian yang selanjutnya sebagai bahan awal dengan menampilkan data primer yang didapati penulis dan dilakukan analisis terhadap data tersebut untuk mendapatkan rumusan masalah dalam penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan sebagai alat dalam menganalisa. Penelitian ini menganalisis bagaimana Politik Pembangunan Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Wisata : Studi Kasus Pada Kawasan Pantai Tanjung Kajuwulu Desa Magepanda Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada bab ini akan menguraikan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh orang lain dan apa yang akan dilakukan oleh peneliti agar terlihat apa yang membedakan dengan penelitian yang sudah ada. Adapun konsep dan teori yang digunakan yaitu berhubungan dengan Pembangunan Politik.

## **BAB III METEDOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai metode yang digunakan dengan memakai metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dan untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu wawancara dan studi kepustakaan, teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, dan analisis data.

## **BAB IV GAMBARAN UMUM**

Dalam bab ini diuraikan beberapa sub-bab yang mana peneliti akan menguraikan Gambaran umum mengenai Sejarah Kabupaten Sikka, Sejarah Pantai tanjung kajuwulu, dan Sejarah Desa Magepanda.

## **BAB V HASIL DAN PEMABAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan Hasil penelitian dan pembahasan.

## **BAB VI PENUTUP**

Dalam bab ini akan menguraikan simpulan dan saran dari hasil penelitian penulis.